

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) pada Triwulan II tahun 2025 di Kabupaten Aceh Besar mengalami fluktuasi yang signifikan, keadaan ini pada umumnya cenderung menurun, seperti halnya yang digambarkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL INDEK PERUBAHAN HARGA (IPH) KABUPATEN ACEH BESAR

TRIWULAN II TAHUN 2025

Tabel 1. Perubahan IPH Triwulan II

No	Bulan	Minggu ke-	Perubahan IPH (%)
1	April	1	2.08
2	April	2	2.86
3	April	3	2.94
4	Mei	1	-0.60
5	Mei	2	-2.13
6	Mei	3	-2.63
7	Mei	4	-2.81
8	Juni	1	-0.95
9	Juni	2	-0.27
10	Juni	3	-0.82
11	Juni	4	-1.17
		Total	-3.5
		Rata-rata	-0.32

Berdasarkan hasil pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar selama Triwulan II Tahun 2025, perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) menunjukkan dinamika yang cenderung mengarah pada penurunan harga, meskipun pada awal triwulan masih terdapat tekanan kenaikan harga.

Pada bulan April 2025, IPH Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan secara berturut-turut selama tiga minggu pengamatan, masing-masing sebesar 2,08 persen pada minggu pertama, 2,86 persen pada minggu kedua, dan 2,94 persen pada minggu ketiga. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi pada awal triwulan, yang diduga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan terhadap komoditas tertentu serta faktor musiman.

Memasuki bulan Mei 2025, perkembangan IPH menunjukkan pembalikan arah dengan terjadinya penurunan harga di seluruh minggu pengamatan. IPH tercatat sebesar -0,60 persen pada minggu pertama, -2,13 persen pada minggu kedua, -2,63 persen pada minggu ketiga, dan -2,81 persen pada minggu keempat. Penurunan yang semakin dalam tersebut mengindikasikan terjadinya deflasi, seiring dengan membaiknya pasokan komoditas serta menurunnya tekanan permintaan.

Selanjutnya, pada bulan Juni 2025, IPH Kabupaten Aceh Besar masih berada pada zona negatif, namun dengan besaran yang relatif lebih terkendali. Perubahan IPH tercatat sebesar -0,95 persen pada minggu pertama, -0,27 persen pada minggu kedua, -0,82 persen pada minggu ketiga, dan -1,17 persen pada minggu keempat. Kondisi ini menunjukkan adanya proses stabilisasi harga setelah deflasi yang cukup dalam pada bulan Mei.

Secara kumulatif, total perubahan IPH selama Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar -3,5 persen dengan rata-rata perubahan mingguan sebesar -0,32 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar mengalami deflasi moderat pada Triwulan II, yang mengindikasikan bahwa tekanan inflasi relatif terkendali.

TPID Kabupaten Aceh Besar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Ke depan, TPID juga akan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi fluktuasi harga musiman serta memastikan agar deflasi yang terjadi tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan produksi dan pendapatan pelaku usaha.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Di lihat dari perkembangan IPH triwulan II di Kabupaten Aceh Besar yaitu masih adanya lonjakan harga di awal periode, fluktuasi harga antar bulan, serta deflasi yang cukup dalam dan berkelanjutan yang menunjukkan perlunya penguatan system antisipasi, stabilisasi dan perlindungan terhadap produsen. Identifikasi permasalahan pada triwulan II disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Terdapat lonjakan harga pada awal triwulan
2. Terjadi fluktuasi harga yang cukup tajam antar bulan
3. Kestabilan harga belum konsisten
4. Deflasi yang cukup dalam berpotensi menekan pendapatan produsen dan petani
5. Stabilitas pasar belum optimal
6. Distribusi pada periode puncak belum maksimal
7. Lemahnya buffer stock
8. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan
9. Pasokan melimpah pada bulan mei
10. Permintaan melemah

Terbatasnya serapan pasar

- 11.
 12. Harga belum kembali seimbang
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bupati Aceh Besar Syech Muharram Idris mendampingi Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dalam rangka panen raya serentak nasional di Gampong Lam Carak Kecamatan Seulimeum. Panen raya tersebut dilakukan secara serentak Bersama 14 Provinsi lainnya di Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
- Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan dan evaluasi ketahanan pangan nasional di Kabupaten Aceh Besar di Gudang Bulog Aceh Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya.
- Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kopukmdag Aceh Besar Trizna Darma, ST dan Camat Ingin Jaya Mubarak Akbar, S.STP., MM melakukan peninjauan ke Pasar Induk Lambaro untuk melihat secara langsung kondisi pasar dan mendengarkan keluhan para pedagang.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerja sama dengan Bulog Kanwil Aceh menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Kecamatan Seulimeum dan halaman Kantor Camat Kecamatan Lembah Seulawah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan gerakan menanam di pekarangan rumah maupun pemanfaatan lahan kosong secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat ketersediaan pangan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang perlu dievaluasi efektivitasnya melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis.
2. Kalau ada Indikasi ketidakseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) perlu didukung oleh ketersediaan data neraca pangan yang akurat dan diperbarui secara berkala, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat dirumuskan secara tepat sasaran serta dievaluasi berdasarkan

perkembangan stok dan harga.

3. Menambah dan memperluas jaringan alternatif dengan daerah pemasok bahan pangan yang terjangkau guna meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya logistik, yang selanjutnya perlu dievaluasi melalui penurunan disparitas harga dan kelancaran pasokan antarwilayah.
4. Mendorong peningkatan kemampuan manajemen usaha, baik dalam pengelolaan barang maupun keuangan, khususnya bagi pelaku usaha pangan, sebagai bagian dari penguatan rantai pasok, serta dievaluasi melalui peningkatan kapasitas usaha dan stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen.
5. Memperkuat kerja sama antar daerah kabupaten serta meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, yang perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan efektivitas koordinasi, realisasi program, dan dampaknya terhadap stabilitas harga.
6. Upaya menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis melalui koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, dan wilayah pemasok telah berkontribusi terhadap terjadinya koreksi harga pada periode Februari-Maret serta Mei-Juni. Namun, lonjakan harga yang terjadi pada Januari dan April menunjukkan bahwa kesiapan pasokan dalam menghadapi peningkatan permintaan musiman masih belum optimal.
7. Pelaksanaan operasi pasar dan pemantauan harga secara berkala membantu menahan kenaikan harga lanjutan serta mendorong terjadinya deflasi moderat. Meski demikian, volatilitas harga antar minggu masih relatif tinggi.
8. Distribusi komoditas secara umum berjalan relatif lancar, tercermin dari kemampuan pasar melakukan penyesuaian harga setelah periode tekanan. Namun, pada periode puncak permintaan, distribusi masih memerlukan penguatan.
9. Sosialisasi kepada masyarakat terkait harga dan ketersediaan komoditas telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu membentuk ekspektasi harga yang stabil.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas penting.
2. Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar dan produksi pangan secara mandiri oleh
3. Melaporkan Laporan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) secara harian kepada Inspektur di Daerah dalam rangka penanganan inflasi di Daerah.
4. Melakukan 6 Upaya Konkrit dalam Penanganan Inflasi di Daerah sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Nomor 143/ PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam penanganan Dampak inflasi di daerah, yaitu:
 - Melakukan operasi pasar murah;
 - Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - Kerjasama dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - Melakukan Gerakan Menanam;

Merealisasikan Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Dan Belanja Wajib
Perlindungan Sosial Kabupaten Aceh Besar;

- Dukungan Transportasi dari APBD.